

Prakarsa Komunitas Sipil Inklusif: Studi Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan di Maktab Tuli As-Sami Pontianak

Arief Adi Purwoko¹ Pipit Widiatmaka²

Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia¹

Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia²

Email: ariefadipurwoko@iainptk.ac.id¹ pipitwidiatmaka@student.uns.ac.id²

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prakarsa komunitas sipil inklusif dalam meretas ketimpangan struktural pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga negara tuli di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kesenjangan antara negara dan rendahnya tingkat literasi masyarakat marjinalisasi ganda bagi subjek tuli. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama informan kunci yang diperkuat melalui observasi partisipatif serta studi dokumentasi primer. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maktab Tuli As-Sami bertindak sebagai manifestasi agensi kewarganegaraan transformatif yang mengisi kekosongan peran negara melalui penyediaan arena pendidikan berbasis Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan budaya tuli. Transformasi gerakan terwujud dari pergeseran pendekatan karitas menuju model berbasis keberdayaan kedaulatan warga dengan mengaktualisasikan prinsip dan etika budaya tuli. Keberlanjutan gerakan ini ditopang oleh pengembangan modal sosial melalui kemitraan strategis bersama komunitas sipil yang luas, perguruan tinggi, dan lembaga birokrasi lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemandirian komunitas sipil akar rumput di Maktab Tuli As-Sami merupakan wujud *best practice* dari gerakan inklusi yang mampu menjamin kedaulatan dan pemenuhan hak dasar pendidikan tuli secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Keywords: Prakarsa Sipil, Hak Pendidikan Tuli, Budaya Tuli



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak dasar pendidikan, terutama bagi warga negara penyandang tuli bukan lah perkara yang mudah. Meskipun negara berusaha hadir sekurang-kurangnya melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada aras implementasi dihadapkan pada inkapabilitas kompleks. Bagaimana tidak, menempatkan warga negara tuli sebagai subjek niscaya melibatkan kesemestaan diri dan lingkungannya, kemudian menempatkannya pada keterlemparan (*geworfenheit*) harus diperjuangkan—yakni tidak semata-mata ekspos terhadap ketidakberdayaan fisiologis melainkan secara sirkular menyeret pada persoalan sosio-politik-budaya yang melingkupinya (Ulil Rosyad, 2025). Rilis statistik Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025/2026 akan menjadi pintu masuk diskursus yang menarik terhadap perbincangan hak dasar warga negara penyandang disabilitas—terutama bidang pendidikan dasar dengan pemenuhannya. Pada tahun tersebut, Ketersediaan Sekolah Luar Biasa (SLB) baik berstatus negeri maupun swasta di seluruh Indonesia tercatat 2.396 satuan pendidikan, berbanding dengan jumlah peserta didik disabilitas mencapai 166.242 siswa, atau dalam rasio 1:69. Adapun peserta didik tuli di Indonesia mencapai 25.597, atau dalam rasio 1:11 (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026). Ditinjau dari idealitas rombongan belajar tentu saja rasio tersebut dikategorikan memperhatikan, mengingat SLB merupakan ruang pendidikan

disabilitas terpadu. Jauh lebih dalam, apa yang perlu dicermati adalah bagaimana lapisan data (*overlay*) dan atributnya, meliputi guru Bahasa Isyarat, ketersediaan infrastruktur pendidikan tuli, atau masalah lain yang melibatkan jarak sosial penerima hak dengan ruangnya, dukungan budaya, maupun berbagai aspek kualitatif lain.

Tantangan pemenuhan hak dasar pendidikan warga negara tuli tampak semakin nyata di daerah. Di Provinsi Kalimantan Barat, misalnya, sebanyak 223 siswa tuli harus berbagi tempat di 15 SLB negeri, sementara 115 siswa tuli lainnya tersebar di 13 SLB swasta. (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjuangan warga negara tuli di daerah untuk mendapatkan akses pendidikan dasar jauh lebih menantang dibandingkan dengan kondisi nasional. Kehadiran ruang pendidikan inklusif dan kompetensi Bahasa Isyarat subjek tuli tidak serta merta membuat subjek tuli terbebas dari masalah sosial. Keterbatasan komunitas Bahasa Isyarat di ruang publik menyisakan kesenjangan komunikasi sosial antara subjek tuli dengan dengar (Setyawan, 2019; Anggraini, 2024; Savitri et al., 2026). Di tengah kegersangan ruang dan kekakuan struktur formal, selalu terselip celah bagi hadirnya harapan. Maktab Tuli As-Sami, komunitas sipil yang berkedudukan di Kota Pontianak, hadir sebagai inisiatif akar rumput yang mencoba mendefinisikan kembali lanskap pendidikan bagi subjek tuli—ekosistem yang melampaui paradigma pendidikan konvensional yang hanya berfokus pada *input* maupun *output* semata—tanpa mengabaikan budaya tuli (*deaf culture*) sebagai atribut ontologi eksistensialnya.

Keterbatasan ruang akademis dalam membedah praksis kewarganegaraan berbasis partisipasi *civil society* yang mengakar pada pemenuhan hak pendidikan dasar dan budaya tuli menyisakan celah penelitian yang penting untuk dieksplorasi. Maktab Tuli As-Sami, yang terlahir dari kegelisahan sekelompok pemuda atas pendidikan agama (kegiatan dakwah) subjek tuli pada tahun 2022, telah bertransformasi secara positif dan pesat merambah pada advokasi hak-hak sipil, menjadi simpul jejaring inklusif multiagen, menyediakan ruang pelayanan publik swadaya yang berfokus pada pendidikan. Setidaknya hingga semester I (pertama) Tahun 2026, Maktab Tuli As-Sami telah melayani 34 subjek tuli aktif—selanjutnya subjek tuli yang belajar pada komunitas tersebut akan disebut santri tuli—dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, baik yang masih tercatat sebagai siswa di sekolah formal maupun putus sekolah. Pada tataran lebih luas, komunitas tersebut juga secara aktif mengampanyekan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO)—dianggap bahasa alami komunitas tuli—*ketimbang* Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) yang sering disebut sebagai bahasa artifisial komunitas dengar (Saraswati & Towidjojo, 2022; Khoeriyah et al., 2024; Malika & Berlianti, 2025).

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan alternatif pemahaman, bahwa perbincangan bahwa subjek tuli merupakan bagian tidak terpisahkan dari diskursus sosiopolitik, kewarganegaraan, dan prakarsa sipil. Dalam hal ini komunitas hadir bukan sebagai institusi pendidikan pengganti, melainkan sebagai manifestasi agensi kewarganegaraan transformatif (*transformative citizenship agency*). Kehadiran gerakan berbasis keswadayaan juga menawarkan kebaruan konseptual, bagaimana kesemestaan otentik tuli dapat dimobilisasi oleh masyarakat sipil sekaligus mendefinisikan ulang hak kewarganegaraan berbasis partisipasi intersubjektif. Membedah dinamika Maktab Tuli As-Sami melalui lensa kewarganegaraan menjadi krusial untuk memetakan sejauh mana prakarsa akar rumput mampu memperluas batas-batas keterlibatan warga negara tuli dalam menentukan nasib kultural dan sosialnya secara mandiri.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus menjadi pilihan terbaik untuk membedah isu-isu sosial, khususnya dalam penelitian ini yang berusaha mengungkap prakarsa sipil dalam aksi dan atribut spesifik, yakni pemenuhan hak dasar pendidikan warga negara tuli.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kecukupan data, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam menyasar informan kunci, melibatkan ketua dan sekretaris komunitas Maktab Tuli As-Sami, Juru Bahasa Isyarat (JBI), guru, dan relawan di lingkungan komunitas tersebut. Tujuannya untuk menggali konstruksi gagasan, dinamika tata Kelola, dan strategi pengembangan. Dalam upaya menjamin keabsahan data, proses triangulasi memegang peranan penting dalam penelitian kualitatif. Oleh karenanya, data wawancara dari entitas masyarakat sekitar maktab maupun orang tua dari santri tuli menjadi titik konfirmasi—dalam proses triangulasi sumber atas aksi dan manfaat komunitas. Triangulasi teknik dilibatkan untuk memberikan garansi keabsahan data yang berkaitan dengan interaksi, komunikasi, pelestarian budaya tuli, atau hal-hal lain yang secara empiris menuntut kehadiran peneliti secara langsung. Untuk keperluan dimensi analitis, studi dokumentasi primer yang memuat arsip-arsip kelembagaan, data demografis, maupun dokumen-dokumen legal diproses secara interaktif sehingga diperoleh pemahaman yang adekuat. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transformasi Aksi

Keprihatinan terhadap rendahnya literasi keagamaan subjek tuli merupakan titik awal berdirinya komunitas. Langkah terwujud untuk pertama kalinya pada 8 April 2023—bertepatan dengan 7 Ramadan 1443H—Maktab Tuli As-Sami bergerak menghadirkan ruang inklusif pendidikan keagamaan bagi subjek tuli, di wilayah kecamatan Pontianak Barat. Layaknya inisiatif akar rumput pada umumnya, komunitas tidak serta-merta diterima secara terbuka oleh di lingkungan sosial sekitar. Berbagai tantangan berupa resistensi kulural, stigma negatif terhadap subjek disabilitas, dan rendahnya tingkat pemahaman publik terhadap kesetaraan dan kesederajatan warga negara penyandang disabilitas mewarnai fase gerakan akar rumput ini. Keterbatasan internal juga menciptakan tantangannya sendiri—ketiadaan aset dan minimnya akses terhadap arena pendidikan membuat komunitas hanya mampu menampung 6 (enam) santri tuli, berfokus pada kemampuan membaca Al-Qur'an Isyarat. Bahkan resistensi sosial memaksa komunitas untuk berjuang lebih keras, menjalankan pola operasional pendidikan secara berpindah-pindah.

Tidak menyurutkan komitmen, berbagai tantangan dan hambatan justru menjadi pelecut motor komunitas untuk terus bergerak. Secara konsisten Maktab Tuli As-Sami menjadikan BISINDO sebagai pilihan dalam komunikasi, pembelajaran, hingga pengorganisasian seluruh program pendidikannya. Pilihan tersebut bukan tanpa alasan, BISINDO dipercaya sebagai representasi ontologi otentik budaya tuli itu sendiri. Memasuki tahun 2024, Maktab Tuli As-Sami memperluas manfaat dan gerakan dengan cara meleburkan diri kepada Yayasan Bhakti Arumi Delangga yang secara resmi memperoleh legalitas badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui SK Pengesahan Nomor: AHU-0013129.AH.01.04. Tahun 2024. Pencapaian legalitas tersebut memberikan daya dorong perluasan jangkauan prakarsa sipil, tidak hanya terbatas pada warga negara tuli, turut menjadi bidan lahirnya komunitas autisme (Maktab Autism Al-Araf) dan komunitas pembinaan anak bermasalah hukum (Dar El Fitrah). Kehadiran yayasan berbadan hukum ini juga menandai transisi penting—dari komunitas sipil informal menjadi Organisasi Masyarakat Sipil, yang memiliki posisi tawar lebih strategis untuk menjalin kemitraan kepada pemangku kebijakan maupun maupun kelembagaan yang lebih luas.

Perkembangan kelembagaan dan penguatan legitimasi sosial yang diraih Maktab Tuli As-Sami juga berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas layanan pendidikan bagi para santrinya. Saat ini, lembaga tersebut aktif memfasilitasi 34 santri Tuli dalam dinamika

pembelajaran harian. Guna merespons tingginya kebutuhan akan ruang belajar yang lebih intensif, maktab bahkan telah menyediakan fasilitas santri mukim, meskipun keberadaannya masih terbatas bagi santri tuli laki-laki akibat keterbatasan daya tampung dan keterbatasan infrastruktur fisik yang dimiliki. Keberlanjutan (*sustainability*) pergerakan Maktab Tuli As-Sami ditopang oleh ekosistem sumber daya manusia yang solid dan terorganisasi secara efektif. Operasional harian serta fungsi advokasi lembaga diawaki oleh 7 (tujuh) orang Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang bertindak sebagai jembatan komunikasi dan translasi budaya, 12 orang Guru Maktab yang mengelola program literasi keagamaan serta pembelajaran Al-Qur'an Isyarat, dan 21 relawan aktif yang menjadi tulang punggung kegiatan sosial serta penggalangan jaringan di lapangan.

Daya Jelajah dan Jangkauan Partisipasi

Perkembangan prakarsa sipil yang diusung oleh Maktab Tuli As-Sami menunjukkan artikulasi gerakan yang semakin kuat. Ditinjau dari angka partisipan, tercatat 34 santri tuli secara konsisten terlibat dalam program-program literasi yang ditetapkan komunitas. Sebaran partisipan terdiri dari 18 lelaki dan 16 perempuan. Rentang usia partisipan cukup lebar, yakni usia tertinggi 38 tahun, usia Terendah 11 tahun. Hal tersebut menunjukkan kehadiran komunitas memiliki arti penting bagi pendidikan masyarakat, terutama subjek tuli. Profil demografis lain yang perlu digarisbawahi adalah dominasi usia partisipan dalam rentang 11-19, yakni sebesar 21 orang (62%). Tingginya konsentrasi usia partisipan pada fase remaja (*adolescence*) menandai kebutuhan pendidikan yang krusial dalam pembentukan karakter dan identitas sosial warga tuli. Dalam arti lain, pada fase tersebut santri remaja tuli tidak hanya membutuhkan transfer pengetahuan atau keterampilan teknis, tidak kalah penting komunitas juga dituntut menjadi ruang aman dalam menginternalisasi karakter tanpa meninggalkan budaya tuli itu sendiri,

Tabel 1. Partisipasi Pendidikan Subjek Tuli berdasar Usia

No	Usia dlm. Tahun	Angka Partisipasi Subjek Tuli (%)
1	11	5 Orang (15%)
2	12	2 Orang (6%)
3	13	3 Orang (9%)
4	14	7 Orang (21%)
5	15	0 Orang (0%)
6	16	2 Orang (6%)
7	17	2 Orang (6%)
8	18	2 Orang (%)
9	<18	13 Orang (38%)

Mencermati tabel 1 dan hasil olah catatan lapangan, terdapat dinamika yang cukup kompleks terkait keterhubungan antara pendidikan nonformal Maktab Tuli As-Sami dan jalur pendidikan formal. Sejumlah santri tuli tercatat masih aktif mengenyam pendidikan formal di SLB negeri maupun swasta di sekitar Kota Pontianak maupun Kabupaten Kubu Raya, beberapa diantaranya harus menerima kenyataan putus sekolah, sejumlah lainnya mengalami jeda waktu pendidikan (*gap year*), bahkan terdapat santri yang tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali. Berbagai hambatan berupa penyesuaian kurikulum, residu kesenjangan komunikasi, aksesibilitas terhadap fasilitas sekolah, masalah dukungan orang tua di masa lalu ditengarai menjadi faktor determinan yang memaksa sejumlah santri tuli menunda atau bahkan memutus pendidikannya.

Pada titik tersebut, komunitas sipil ini hadir menjadi daya dorong keuletan santri tuli. Dibuktikan dengan 4 (empat) santri (12%) yang mengalami *gap year*—kisaran 2 (dua) hingga 7 (tujuh) tahun melanjutkan pendidikan formal ke jenjang pendidikan tinggi, tepatnya di usia 20 dan 25 tahun. Menariknya, keseluruhan santri yang melanjutkan jenjang pendidikan tinggi mendapatkan beasiswa dari lembaga penyelenggara pendidikan tinggi tujuan. Tidak berhenti di situ saja, pihak komunitas juga mengambil inisiatif untuk mengirimkan 2 (dua) JBI untuk mendampingi dan memfasilitasi santri tuli tersebut dalam proses pendidikannya. Bahkan JBI pendamping juga terdaftar sebagai mahasiswa pada *intake* tahun yang sama.

Tabel 2. Asal Daerah Subjek Tuli

No	Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Subjek Tuli (%)
1	Kab. Kayong Utara	1 Orang (3%)
2	Kab. Ketapang	2 Orang (6%)
3	Kab. Kubu Raya	2 Orang (6%)
4	Kab. Landak	2 Orang (6%)
5	Kab. Mempawah	2 Orang (6%)
6	Kab. Sekadau	1 Orang (3%)
7	Kab. Sintang	1 Orang (3%)
8	Kota Pontianak	22 Orang (65%)

Dari informasi tabel 2, sebaran asal daerah santri mencakup jangkauan yang luas, tersebar di 8 (delapan) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun dominasi asal domisili santri dari Kota Pontianak, yakni sebesar 22 orang (65%). Dominasi asal domisili santri yang berasal dari Kota Pontianak tidak serta merta dapat ditarik simpulan karena dekat dengan titik pelayanan Maktab Tuli As-Sami. Terdapat 4 (empat) santri (12%) yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Data tersebut bersanding dengan paradoks implementasi kebijakan publik terkait penyediaan fasilitas pendidikan disabilitas, bahwa di Kota Pontianak—sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat—tidak terdapat satu pun SLB berstatus negeri. Kondisi tersebut menegaskan bahwa Maktab Tuli As-Sami' bukan hanya penyedia layanan pendidikan komplementer, lebih dari itu, marjinalisasi ganda subjek tuli baik dari aspek sosial maupun struktural dalam hal pendidikan, prakarsa sipil mampu mengisi kekosongan peran negara (*state void*).

Strategi Pengembangan Komunitas

Sebagai komunitas swadaya, bukan berarti Maktab Tuli As-Sami bergerak dalam ruang isolasi. Progresivitas gerakan yang ditunjukkan mengungkap akselerasi perjuangan dibangun di atas jejaring strategis, manifestasi nyata dari penggalangan modal sosial dan perluasan daya jelajah. Dalam beberapa kesempatan, komunitas secara terbuka menjalin kemitraan lintas sektor termasuk di dalamnya lembaga penyelenggara pendidikan tinggi. Misalnya dengan IAIN Pontianak dan Universitas Tanjung Pura, selain membuka pintu peluang santri tuli untuk dapat mendapatkan hak pendidikan tingkat lanjut, komunitas juga secara gamblang menjadi aktor kunci dalam merancang dan mengimplementasikan berbagai agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Sebaliknya, penyelenggara pendidikan tinggi mendapatkan keuntungan dalam mengembangkan pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat.

Hakikatnya, ketahanan dan kapasitas pengelolaan kebijakan kekuasaan—pemerintah—pada dasarnya selalu terbatas, demikian juga dengan daya jelajah sipil dalam memenuhi hak dasarnya. Masing-masing subjek memainkan peran penting dalam meredakan masalah sosial, artinya solidaritas diantara keduanya akan melipatgandakan keuletan dalam menambal kekurangan baik dalam memenuhi kewajiban di pihak pemerintah dan meraih hak dasar di pihak warga negara (Kövé, 2021). Sinergi strategis antara Maktab Tuli As-Sami' dengan

pemerintah lokal, seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pontianak membuka kesempatan terhadap aksesibilitas terhadap ruang publik dan pemenuhan hak literasi yang lebih luas. Secara mutual, jejaring lintas elemen tersebut membuka celah partisipasi (*channels of participation*). Misalnya, kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menciptakan ruang literasi ramah tuli sekaligus memperkuat kelembagaan sebagai ruang institusional yang adaptif melalui penyelenggaraan pelatihan BISINDO bagi aparatur layanan publik. Kolaborasi dengan LPKA menghadirkan ruang ruang literasi dan advokasi inklusif bagi anak yang berhadapan hukum baik dalam konteks preventif maupun kuratif.

Selain memperkuat jejaring pada sektor birokrasi, Maktab Tuli As-Sami juga membangun konsolidasi intensif dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lintas isu. Kemitraan strategis mencakup kolaborasi antarkomunitas tuli maupun ragam komunitas disabilitas, seperti West Borneo Deaf Community, Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatun) Kalimantan Barat, dan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo). Tentu saja solidaritas antarkomunitas tuli dan ragam komunitas disabilitas tidak hanya berorientasi pada anjangsana maupun kegiatan lintas komunitas semata, melainkan juga menjadi inkubator ide dalam upaya pemberdayaan kewargaan. Selanjutnya kemitraan strategis dengan LSM seperti dengan Perkumpulan keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menjadi langkah krusial. Agenda kegiatan kolaboratif sepanjang Tahun 2026 dengan LSM tersebut menyentuh aspek-aspek mendesak, meliputi penguatan literasi kesehatan dan reproduksi, serta kampanye BISINDO terutama di lingkungan keluarga tuli. Sebagaimana terungkap pada data Tabel 1, santri pada rentang usia remaja menduduki porsi terbesar di Maktab Tuli as-Sami, sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan literasi kesehatan dan reproduksi diproyeksikan memberi bekal pengetahuan untuk pencegahan risiko kesehatan fisik, mental, dan sosial. Catatan menarik dalam kampanye BISINDO, kesenjangan komunikasi sosial antara subjek tuli dan dengar tidak hanya terjadi dalam lingkungan sosial yang luas, bahkan di lingkungan keluarga subjek tuli, masih banyak anggota keluarga yang tidak memiliki kemampuan memadai berbahasa isyarat. Fakta empiris tersebut meninggalkan residu berupa kesenjangan komunikasi pada ranah domestik.

Pembahasan

Dalam sudut pandang ontologis, manusia tidak dapat memilih untuk dilahirkan sebagai apa (Tugut, 2025). Pada realitas yang sama, dalam kesemestaan sosial manusia juga terlempar dalam dimensi "*zoon politikon*"—konsep yang diperkenalkan Aristoteles bahwa manusia hanya dapat mencapai hidup yang utuh saat berada dalam komunitas politik (Aladin, 2026). Politik di sini bukan merujuk kepada definisi sempit struktur kekuasaan, tetapi secara utuh melibatkan kebijaksanaan praktis (*phronesis*) menuju kebahagiaan sejati (*eudaimonia*) sehingga untuk meraihnya membutuhkan kebahagiaan dan kesejahteraan kolektif. Sama halnya dengan interaksi dalam Maktab Tuli As-Sami. Tuli bukan lah pilihan untuk lahir di dunia, menghadapi realitas untuk berjuang secara otentik (*dasein*) dan melebur pada kemewaktuan adalah cara terbaik untuk mengisi takdir daripada harus menyerah pada keadaan. Pada taraf tersebut, inisiasi *liyan* (*the other*) menjadi penting, prakarsa yang merujuk pada kreasi ruang bersama yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan kesederajatan, sebagaimana subjek dengar dan subjek tuli terikat dalam satu wadah.

Secara konsisten, aksi sipil yang dilakukan oleh Maktab Tuli As-Sami tidak didasarkan pada objek belas kasihan (*charity based*). Komunitas menempatkan subjek tuli sebagai ontologi otentik yang berdaya. BISINDO tidak hanya ditempatkan sebagai bahasa komunikasi, jauh lebih dalam maknanya, yakni budaya yang tercipta dari kosmologi alaminya. Budaya tuli merujuk pada kesetaraan dan kesederajatan melalui akomodasi yang presisi atas cara subjek tuli

mencerap realitas empiris dan mengejawantahkannya dalam kehidupan keseharian. Bukan dikotomi biner antara komunitas tuli dengan komunitas dengar, atau bahkan sekedar penyeragaman Bahasa Isyarat untuk kepentingan komunikasi kedua komunitas tersebut. Budaya tuli lebih dimaknai sebagai penghormatan atas otentisitas norma dan budaya yang terbentuk secara alami dari keunikan subjek tuli berinteraksi dengan dunianya (Holcomb, 2023).

Jika ditelisik lebih mendalam, pemilihan BISINDO juga merupakan bentuk komitmen terhadap penegakan prinsip-prinsip budaya tuli. Dalam etika BISINDO, dikenal istilah “guru tuli” yang merujuk pada pembelajaran bahasa isyarat harus diampu oleh subjek tuli. Hal tersebut mengantarkan kepada pemahaman bahwa BISINDO tidak hanya membahas teknik pembelajaran semata. Terdapat aturan main di dalamnya, menempatkan objek tuli sebagai agen yang sah—bukan otoritatif melainkan penghormatan pada kosmologi tuli yang tidak dapat dirasakan oleh subjek dengar (Gumelar et al., 2018; Solihin, 2023). Keberadaan Maktab Tuli As-Sami’ merupakan bagian dari praktik baik (*best practices*) masyarakat madani (*civil society*). Pada kenyataannya dalam praktik demokrasi selalu menyisakan celah pada prinsip keterbatasan negara dalam mengakomodasi seluruh hak dasar warga negaranya. Justru pada celah tersebut, prakarsa sipil selalu hadir untuk menambalnya. Demokrasi tidak akan berjalan ketika warga negara terlalu mengharap kehendak baik (*good will*) dari pemangku kebijakan. Prakarsa sipil dengan melibatkan *liyan* (*the others*) untuk menutup celah negara merupakan gambaran kebaikan moral (*moral good*).

Data demografi dan sebaran spasial santri Maktab Tuli As-Sami’ secara implisit menjelaskan celah implementasi kebijakan (*policy gap*) negara. Konsentrasi 65% santri Maktab Tuli As-Sami yang berdomisili di Kota Pontianak menguak kontradiksi kebijakan publik yang krusial, yakni ketiadaan satu pun Sekolah Luar Biasa (SLB) berstatus negeri di ibu kota provinsi. Fakta tersebut mempertegas justifikasi bahwa dalam mekanisme demokrasi prosedural, kelompok minoritas seperti warga negara tuli bukan menjadi prioritas penyedia layanan dasar oleh pemangku kebijakan (Palar et al., 2023). Dampak langsung dari kekosongan peran negara (*state void*) dapat direfleksikan melalui struktur usia dan rekam jejak pendidikan para santri. Dominasi 62% santri pada rentang usia remaja (11–19 tahun) juga menandai bahwa keberadaan kelompok usia adolesens yang sangat rentan terhadap marginalisasi pendidikan. Pada tataran kritis tersebut, Maktab Tuli As-Sami merupakan wujud arena kebaikan kolektif. Aksi nyata berupa pengorganisasian 12 guru maktab, 7 JBI, 21 relawan aktif, serta konsolidasi lintas isu maupun sektor adalah deskripsi hidup dari kebaikan moral (*moral good*) yang melampaui segala keterbatasan. Berbagai catatan tersebut, bukan hal yang berlebihan untuk meletakkan kesimpulan bahwa komunitas sipil tidak hanya hadir sebagai alternatif tetapi wujud kedaulatan dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Prakarsa yang dibangun oleh Maktab Tuli As-Sami tidak dapat begitu saja dipandang sebagai gerakan agen tunggal. Masyarakat madani merupakan kesemestaan ekosistem yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain atas dasar komitmen moral dan solidaritas sosial (Erfain, 2025; Jb & Darmawan, 2016). Jejaring antara komunitas sipil Solidaritas antarkomunitas tuli maupun lintas disabilitas menancapkan pondasi kokoh untuk meneguhkan pemaknaan dan tujuan perjuangan hak-hak sipil mereka. Perguruan tinggi merupakan mitra penting dalam aksi yang dilakukan oleh komunitas sipil. Selain memiliki pengalaman dalam merealisasikan ide melalui prinsip-prinsip yang ketat, perguruan tinggi merupakan otoritas dan independensi untuk mengembangkan pengetahuan maupun teknologi—secara etis tidak dapat diintervensi oleh entitas di luarnya (Sumarto, 2025).

Dalam kasus ini, perguruan tinggi seperti IAIN Pontianak maupun penyelenggara pendidikan tinggi lainnya merupakan modal penting dalam pengembangan Maktab Tuli As-



Sami sekaligus menjadi motor ganda untuk mencapai tujuan komunitas. Perguruan tinggi secara *luwes* dapat berperan menjadi mediator dalam konteks relasi kuasa sekaligus penyeimbang dari prasangka naif. Jalinan kemitraan juga memaksa perguruan tinggi keluar dari menara gading, menunaikan tanggung jawab moralnya untuk menyediakan ruang inklusif kepada mereka subjek pendidikan minoritas. Senada dengan jejaring tersebut, peranan OMS dan LSM lintas isu—seperti PKBI—membukakan pintu aksesibilitas terhadap multimodal sekaligus secara sinergis bergerak membongkar batas-batas struktural dan kebijakan.

Interpretasi objektif dan berimbang terhadap relasi sipil dan negara tidak boleh diabaikan begitu saja. Pada kenyataannya marjinalisasi terhadap fasilitas pendidikan tuli hanya salah satu permasalahan besar dari pendidikan di Indonesia. Politik dan implementasi anggaran pendidikan justru terjebak dalam kepentingan-kepentingan retorik bahkan sebagai sasaran objek korupsi (Juanda, 2021). Pemerintah sebenarnya tidak sepenuhnya absen dari kesemestaan subjek tuli. Bukti material yang dapat diajukan adalah hadirnya Disperpusip dan LPKA Kota Pontianak yang bersinergi dengan Maktab Tuli As-Sami. Yayasan Bhakti Arumi Delangga sebagai payung komunitas juga merupakan bukti bahwa setidaknya negara mengakomodasi hak-hak sipil dengan kepastian hukum. Namun demikian, seharusnya jalinan kemitraan antara komunitas sipil dengan pemerintah diletakkan sebagai pola kedaulatan secara *bottom up*, untuk mengoreksi sekaligus menutup celah yang ditinggalkan di masa lalu.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kemandirian komunitas sipil akar rumput di Maktab Tuli As-Sami merupakan wujud *best practice* dari gerakan inklusi yang mampu menjamin kedaulatan dan pemenuhan hak dasar pendidikan tuli secara berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui mobilisasi modal sosial, pelembagaan Yayasan Bhakti Arumi Delangga, serta advokasi budaya Tuli berbasis BISINDO, maktab berhasil membuktikan bahwa agensi masyarakat sipil sanggup menembus keterbatasan struktural negara sekaligus menghadirkan ruang transformasi sosial yang emansipatif bagi kelompok disabilitas di Kalimantan Barat. Sebagai saran, pemerintah pusat maupun daerah direkomendasikan untuk dapat mengadopsi model keterjangkauan aksesibilitas berbasis skema kolaborasi publik-swadaya (*public-community partnership*) solusi jangka pendek yang lebih masuk akal ketimbang memaksakan subsidi penuh yang sering terbentur keterbatasan anggaran maupun kepentingan. Pendekatan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan pusat-pusat pembelajaran swadaya seperti Maktab Tuli As-Sami ke dalam ekosistem pendidikan formal--sekurang-kurangnya melalui proyek percontohan--dan mengalokasikan insentif operasional, maupun bantuan sarana-prasarana inklusif. Langkah terpadu ini akan memangkas beban finansial dalam mengatasi politik anggaran jangka pendek sekaligus memastikan hadirnya negara dalam mengawal hak pendidikan inklusif yang bermartabat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aladin, Ihsan. (2026). Human As A Never-Ending Problem: The Genealogy Of The Crisis In Philosophical Anthropology And The Paradox Of The Indonesian Subject—From Zoon Logon Echon To Algorithmic Citizen. Issue: Journal of Islamic Studies for Universal Dialogue, 4(1), 21–84.
- Anggraini, Cynthia Desta. (2024). Membangun jembatan komunikasi. Maliki Interdisciplinary Journal, 2(6), 786–790.
- Erfain, Erfain. (2025). Kekuatan Komunitas Lokal Sebagai Pilar Masyarakat Sipil. Journal of Humanities, Social Sciences, and Education, 1(6), 123–134.
- Gumelar, Gilang, Hafiar, Hanny, & Subekti, Priyo. (2018). Konstruksi makna BISINDO sebagai budaya tuli bagi anggota GERKATIN. Informasi, 48(1), 65–78.



- Holcomb, Thomas K. (2023). Introduction to deaf culture. Oxford University Press.
- Jb, Masroer, & Darmawan, Lalu. (2016). Wacana Civil Society (Masyarkat Madani) Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2), 35–64.
- Juanda, Juanda. (2021). Anomali Anggaran Pendidikan Dalam Pengaturan Dan Praktek. "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 18.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). STATISTIK SLB 2025/2026. <https://data.kemendikdasmen.go.id/publikasi/p/buku-statistik/statistik-sekolah-luar-biasa-slb-tahun-2025-2026-2026>
- Khoeriyah, Intan Maulidia, Winarsih, Murni, & Kasirah, Irah. (2024). Persepsi Guru terhadap Penggunaan SIBI dan BISINDO di SLB. *JPK: Jurnal Pendidikan Khusus*, 3(2), 119–126.
- Kövér, Ágnes. (2021). The relationship between government and civil society in the era of COVID-19. *12(1)*, 1–24.
- Malika, Meysa, & Berlianti, Berlianti. (2025). Penggunaan Bahasa Isyarat SIBI dan BISINDO untuk Siswa Tuli di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Medan. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(3), 78–87.
- Palar, Novie RA, Londa, Very Y., Goni, Shirley YVI, & Kandowangko, Nicolaas. (2023). Ketersediaan Sarana Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Publik Pemerintah Kota Manado. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(2), 203–208.
- Saraswati, Danti Ayu, & Towidjojo, Vera Diana. (2022). Bahasa Isyarat Indonesia. *Jurnal Medical Profession (Medpro)*, 4(1), 8–14.
- Savitri, Desy Irsalina, Bua, Mety Toding, Adiasti, Nindya, Mas'an Al Wahid, Sucahyo, & Rhamdan, Donna. (2026). Menjembatani Sunyi: Bahasa Isyarat Sebagai Upaya Membangun Komunikasi Inklusif Penyandang Tuli. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 54–65.
- Setyawan, Andi. (2019). Komunikasi antar pribadi non verbal penyandang disabilitas di Deaf Finger Talk. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 19(2), 165–174.
- Solihin, Ilham. (2023). Kesetaraan Sosial Dalam Bahasa Isyarat Sebagai Identitas Tuli Di Komunitas Rumah Setara Palembang. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 1(03), 111–130.
- Sumarto, Hetifah Sj. (2025). Inovasi, partisipasi dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Tugut, Filiz Serdar. (2025). Philosophical Practice in Humanitarian Crises: Existential Ruptures and the "Way of Well-Being" Model. *Interdisciplinary Research in Counseling, Ethics and Philosophy*, 5(15), 18–32.
- Ulil Rosyad, Mohammad. (2025). Paradigma Inklusivitas dalam Al-Qur'an: Telaah Pemenuhan Hak Profesi terhadap Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas